

Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kampung Wapeko, Distrik Animha, Kabupaten Merauke

Alexander Phuk Tjilen ^{1*}; Paul Adryani Moento ²

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus, Merauke, Indonesia; alexander@unmus.ac.id; paulmoento@unmus.ac.id

*Correspondence : alexander@unmus.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kampung Wapeko, Distrik Animha, Kabupaten Merauke. Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan situasi tertentu dengan mengumpulkan data secara rinci sesuai dengan permasalahan yang diidentifikasi. Penelitian ini dilakukan di Kampung Wapeko, Distrik Animha, Kabupaten Merauke. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal kesadaran masyarakat di Kampung Wapeko masih sangat rendah yaitu kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan seperti tidak banyak masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan rapat-rapat Kampung seperti Musrenbang Kampung, kemudian faktor eksternal menunjukkan bahwa pemerintah Kampung Wapeko tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai kegiatan pemerintah khususnya Musrenbang Kampung kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya partisipasi dalam Musrenbang Kampung.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the factors that influence Community Participation in Development Plan Deliberation in Wapeko Village, Animha District, Merauke Regency. In this study, a descriptive approach method was used that aims to describe or explain certain situations by collecting detailed data in accordance with the problems identified. This research was conducted in Wapeko Village, Animha District, Merauke Regency. The results of this study show that internal factors of public awareness in Wapeko Village are still very low, namely the lack of community participation in activities such as not many people involved in the implementation of village meetings such as Village Musrenbang, then external factors show that the Wapeko Village government has never conducted socialization about government activities, especially Village Musrenbang to the community, so many people who do not understand the importance of participation in Musrenbang Kampung.

Kata kunci

Analisis, Partisipasi masyarakat, Musrenbang

Keywords

Analysis, Community Participation, Musrenbang

Pendahuluan

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah *platform* bagi pemerintah pada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa untuk mengumpulkan harapan dan masukan dari masyarakat setempat dan menggunakannya dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Ini juga mencerminkan partisipasi warga dan akuntabilitas pemerintah, di mana pemimpin daerah, masyarakat, dan usaha/bisnis berdiskusi tentang program pembangunan daerah dan memperbaiki RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) (Pratama et al., 2018).

Pelaksanaan Musrenbang Daerah didasarkan pada Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1354/M.PPN/13/2014. Surat Edaran tersebut berisi pedoman pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. (Alastyaningsih & Nenobais, 2022). Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa proses Musrenbang dimulai dari tingkat desa/kampung, kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan terakhir tingkat provinsi (Aisyah, 2015).

Partisipasi adalah bagian penting dalam konsep perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat. Ini dapat diartikan sebagai keikutsertaan aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Keikutsertaan ini dapat terlihat dari hadirnya masyarakat dalam setiap undangan Musrenbang Kampung dan turut aktif memberikan sumbangan pemikiran dan membuat keputusan (Irawan & Sunandar, 2020).

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat terlibat dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembangunan, melalui memberikan masukan, tenaga, waktu, keahlian, modal dan materi. Keterlibatan ini merupakan bagian dari interaksi sosial dan memberikan masyarakat kesempatan untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama yang mengakomodasi kepentingan masyarakat secara umum (Yonis, 2016).

Pada saat ini, fokus pembangunan bergerak dari arah bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, karena kebutuhan dan harapan masyarakat harus menjadi dasar bagi pembangunan. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu program, semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin baik hasil program tersebut dan mampu mencapai target yang diinginkan oleh seluruh masyarakat. Hal ini juga lebih efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan pembangunan (Makhmudi & Muktiali, 2018).

Ada beberapa alasan mengapa pembangunan saat ini lebih mengarah ke pola *bottom-up* daripada *top-down* (Kusnadi, 2020): 1).Partisipasi masyarakat: Pembangunan *bottom-up* memfokuskan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan, sehingga masyarakat lebih memahami dan merasa memiliki kepentingan dalam proyek-proyek pembangunan yang dilakukan. 2). Keterlibatan masyarakat lokal: Pembangunan *bottom-up* memastikan bahwa

pemerintah lokal dan masyarakat setempat memiliki keterlibatan dalam proses pembangunan, sehingga mereka lebih memahami dan merasa memiliki kepentingan dalam proyek-proyek pembangunan yang dilakukan (Hasan et al., 2020).
3).Kemampuan adaptasi: Pembangunan *bottom-up* memungkinkan masyarakat dan pemerintah lokal untuk beradaptasi dengan situasi setempat dan menyesuaikan proyek-proyek pembangunan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
4).Akuntabilitas: Pembangunan *bottom-up* memastikan bahwa masyarakat dan pemerintah lokal bertanggung jawab atas proyek-proyek pembangunan yang dilakukan, sehingga mereka lebih memahami dan merasa memiliki kepentingan dalam proyek-proyek pembangunan yang dilakukan.

Konsep partisipasi masyarakat dan arah kebijakan *bottom-up* sangat penting dalam pembangunan saat ini. Ini karena masyarakat merupakan subjek utama dalam pembangunan dan harus terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Keterlibatan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan suatu program pembangunan dan memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Ini juga membantu dalam pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (dengan penggantian nama Kampung untuk Propinsi Papua dan Papua Barat) menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Desa harus didasarkan pada partisipasi masyarakat (Hasan et al., 2020). Dengan tujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa, mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.

Musrenbang tingkat Kabupaten adalah merupakan suatu keharusan bagi daerah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses diskusi tentang Rancangan RKPD harus dilakukan secara partisipatif, demokratis, dan adaptif melalui Musrenbang. Bukan hanya sekedar melaksanakan proses Musrenbang, tetapi juga harus mengimplementasikan hasil dari Musrenbang tingkat Kampung, yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25, 2004)

Kampung Wapeko merupakan salah satu kampung di distrik Animha Kabupaten Merauke dan setiap tahun, Musrenbang Kampung diadakan untuk menyusun RKP Kampung yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan keputusan pembangunan Kampung. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kampung karena itu memainkan peran penting (Kurniawati & Eprilianto, 2022).

Peotensi Kampung Wapeko sebagai lokasi KKN Universitas Musamus dikenal sebagai lambung padi untuk Kabupaten Merauke, karena lahan pertanian luas dan produktif. Pertanian merupakan sektor utama yang membantu memenuhi kebutuhan makan dan menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat setempat. Tanaman padi adalah salah satu komoditas pertanian utama yang ditanam dan diproduksi dalam jumlah besar di kabupaten Merauke yang telah swamsebada beras dan berhasil untuk di kirim ke kota kota di Papua dan di pulau Jawa, serta dilakukan ekspor ke negara PNG. Penduduk Kampung wapeko terdiri dari warga transmigrasi dan masyarakat lokal namun, pembangunan pertanian khususnya untuk masyarakat lokal masih terbatas dan memerlukan perhatian dan dukungan pemerintah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian, seperti peningkatan akses terhadap teknologi pertanian, pelatihan bagi petani, dan peningkatan akses terhadap pasar dan pupuk.

Kesuksesan acara, khususnya Musrenbang Kampung, tidak hanya tergantung pada jumlah peserta yang hadir, tetapi juga dari partisipasi aktif peserta dalam forum. Peserta yang hadir harus dapat memberikan kontribusi secara sukarela, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan akhir. Jika hal tersebut tercapai, maka pelaksanaan Musrenbang Kampung dapat dikatakan berhasil (Purwaningsih, 2022).

Pelaksanaan Musrenbang Kampung tidak selalu berjalan dengan optimal, terutama karena adanya berbagai kendala. Namun, karena keterlibatan masyarakat merupakan bagian integral dari Musrenbang Kampung, kendala tersebut tidak dapat dihindari, terdapat beberapa faktor yang umum terjadi menyebabkan rendahnya kehadiran masyarakat dalam rapat di Kampung Wapeko Kabupaten Merauke, antara lain: 1). Kesulitan akses: kondisi geografis dan transportasi yang sulit di beberapa wilayah Papua dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk hadir dalam rapat. 2). Rendahnya tingkat pendidikan: tingkat pendidikan masyarakat di provinsi Papua yang masih rendah dapat mempengaruhi minat mereka untuk hadir dalam rapat. 3). Kurangnya informasi: banyak masyarakat di provinsi Papua yang mungkin tidak mengetahui rapat-rapat yang berlangsung, atau tidak memahami pentingnya hadir dalam rapat. 4). Kekurangan sarana dan prasarana: fasilitas dan peralatan yang kurang memadai dalam rapat dapat membuat masyarakat enggan untuk hadir. 5). Prioritas lain: masyarakat di provinsi Papua mungkin memiliki prioritas lain seperti urusan ekonomi dan keluarga yang lebih penting bagi mereka daripada hadir dalam rapat.

Persoalan rendahnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kampung di Kampung Wapeko yaitu adanya persepsi masyarakat terkadang, Musrenbang Kampung hanya dianggap sebagai formalitas semata, dan masyarakat belum sepenuhnya dijadikan sebagai pengambil keputusan dalam hasil akhir Musrenbang Kampung. Akibatnya, program yang telah dijadikan prioritas tidak sepenuhnya mencerminkan suara masyarakat (Reskiaddin et al., 2020).

Masalah lain adalah masyarakat masih kurang memahami apa itu Musrenbang Kampung sehingga mereka merasa ragu atau enggan berpartisipasi. Namun, pihak Kampung tetap berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui peningkatan transparansi dan komunikasi antara pemerintah Kampung dan masyarakat. Dalam menghadapi fenomena tersebut, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kampung di Kampung Wapeko perlu diperbaiki agar sesuai dengan harapan. Kerja sama yang baik antara perangkat Kampung dan warga adalah salah satu faktor penting yang dapat memastikan pelaksanaan Musrenbang Kampung berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan (Sigalingging & Warjio, 2015)

Partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan Musrenbang Kampung. Peran masyarakat sangat penting dalam kegiatan tersebut, dan partisipasi masyarakat dapat terlihat ketika mereka turut serta dalam memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Kehadiran, memberikan ide, saran, dan kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang tidak boleh dipaksakan, tetapi harus didasarkan pada rasa kesukarelaan dari dalam diri masyarakat (Suparyanto dan Rosad 2015, 2020) . Menurut hasil penelitian terdahulu , beberapa faktor internal dan eksternal menunjukkan bahwa hanya faktor-faktor seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, komunikasi, dan kepemimpinan yang memiliki korelasi, sedangkan faktor-faktor seperti tingkat penghasilan dan lama tinggal di desa tidak memiliki korelasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbangdes, tergantung pada tingkat pendidikan, tingkat komunikasi, usia, jenis pekerjaan, dan tingkat kepemimpinan. Sementara itu, faktor-faktor seperti tingkat penghasilan dan lama tinggal di desa tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (Hadi et al., 2014). Kemudian Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Jatimulya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepemimpinan, komunikasi, dan pendidikan. Berdasarkan temuan penelitian, terlihat bahwa kepala Desa telah berhasil memainkan perannya sebagai pemimpin dengan baik, dan komunikasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat juga terjalin dengan baik. Namun, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi partisipasi mereka dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Jatimulya (Akbar et al., 2018). Dari dua penelitian di atas, terdapat perbedaan penelitian yang di temukan yaitu, terkait tingkat partisipasi masyarakat yang terjadi baik dari sisi bidang ilmu maupun jenis pekerjaan, serta komunikasi. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan penelitian ini terkait tingkat partisipasi masyarakat, khususnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang lokasi penelitiannya di Kampung Wapeko, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan. Atas dasar berbagai permasalahan diatas, sehingga peneliti mengambil judul tentang Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(MUSRENBANG) di Kampung Wapeko Distrik Animha Kabupaten Merauke. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang, dan mencari solusi agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperbaiki mutu hasil Musrenbang tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini, memberikan sumbangsih pikiran untuk pengembangan studi partisipasi masyarakat serta pengembangan studi kebijakan publik.

Metode

Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang sistematis, akurat, dan faktual mengenai gambaran permasalahan yang diteliti, yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, nyata dan pada saat ini, karena penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Rukajat, 2018). Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan di mana penelitian dilakukan. Lokasi yang dipilih sebaiknya dipertimbangkan berdasarkan kemenarikan, keunikan, dan relevansinya dengan topik penelitian. Dengan memilih lokasi yang tepat, diharapkan peneliti dapat menemukan hal-hal baru dan bermakna (Suwarma Al Muchtar, 2015). Penelitian ini dilakukan di Kampung Wapeko, Distrik Animha, Kabupaten Merauke. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan menetapkan informan penelitian. Analisis data yang dilakukan dengan pembacaan ulang dan memahami data yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber yang relevan, wawancara dengan informan kunci, dokumen rapat, hasil musyawarah dan observasi (Sugiono 2018). Selanjutnya pengkodean dan pengelompokan data, dilakukan untuk memudahkan proses penafsiran data di tahap selanjutnya. Serta melakukan penafsiran data dengan menganalisis setiap kelompok data yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya tahun sebelumnya, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena untuk keperluan mengambil kesimpulan dari data yang telah dianalisis, serta memberikan interpretasi terhadap data tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kampung Wapeko, Distrik Animha, Kabupaten Merauke

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kampung sangatlah kritical untuk menentukan keberhasilan suatu program. Tanpa partisipasi yang aktif dari masyarakat, pelaksanaan Musrenbang Kampung tidak akan berjalan lancar dan tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Partisipasi masyarakat yang aktif sangat diperlukan dalam pelaksanaan Musrenbang Kampung,

terlihat dalam bentuk partisipasi mereka dalam perencanaan ketika Musrenbang Kampung diadakan (Putri, 2016).

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kampung terlihat dalam bentuk hadirnya mereka dalam acara, mengajukan usulan program, serta memberikan masukan dan kritik terhadap program yang diterima dalam setiap tahapan pelaksanaan Musrenbang Kampung. Proses pelaksanaan Musrenbang Kampung di Kampung Wapeko nampaknya belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari rangkaian tahapan pelaksanaan yang dimulai dari tahap persiapan (Pra Musrenbang Kampung). Musrenbang Kampung, dan Pasca Musrenbang Kampung (Kurniawati & Eprilianto, 2022).

Tahapan PraMusrenbang Kampung adalah tahap awal persiapan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kampung. Dalam tahapan ini, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, seperti membahas jadwal Musrenbang Kampung, pembentukan tim pelaksana dan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Kampung, serta melakukan evaluasi Kampung secara partisipatif (rembug warga) untuk membahas masalah di setiap dusun. Usulan program yang dihasilkan dari diskusi ini kemudian dirangkum untuk dibahas pada diskusi panel dalam pelaksanaan Musrenbang Kampung (Razak et al., 2020) .

Sedangkan tahapan Musrenbang Kampung adalah tahapan yang dilakukan tujuh hari setelah Pra Musrenbang Kampung. Tahapannya dimulai dengan pendaftaran peserta undangan, pembukaan acara, dan pemaparan oleh kepala Kampung mengenai hasil evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Desa yang sudah dan belum terlaksana serta prioritas program berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung. Informasi perkiraan anggaran dana Kampung dan sumber anggaran lain juga akan diberikan untuk direncanakan. Selain itu, informasi rencana kegiatan yang diterima dari pusat, provinsi, dan kabupaten juga akan disampaikan pada tahap ini (Hirawan, 2014).

Pihak kecamatan melakukan pemaparan mengenai kebijakan dan prioritas program yang berlaku di kecamatan dan masuk ke Kampung. Kemudian, sekretaris Kampung sebagai ketua Tim RKP Kampung Wapeko menjelaskan draf rancangan awal RKP Kampung yang didapatkan selama acara Pra Musrenbang Kampung. Diskusi panel adalah sesi tanya jawab antara narasumber dengan masyarakat untuk memberikan usulan program baru, saran, dan kritik terhadap pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan menentukan prioritas program dan anggaran dalam bidang yang telah dibahas. Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara Musrenbang Kampung (Hermawan et al., 2018) .

Tahapan setelah Musrenbang kampung adalah tahap akhir yang berisi kegiatan rapat untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kampung, membuat dokumen RKP, menetapkan dokumen RKP sebagai peraturan kampung, dan memberikan latihan untuk tim perwakilan Kampung Wapeko agar mereka dapat memahami data dan penjelasan tentang usulan yang dibawa ke Musrenbang tingkat

kecamatan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam setiap tahapan karena masyarakat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek dari program-program yang akan menjadi prioritas untuk diterapkan. Masyarakat juga yang paling mengerti permasalahan yang ada di setiap dusun sehingga mereka yang mengetahui pembangunan bidang apa yang diperlukan dan bermanfaat bagi masyarakat luas (Tresiana & Duadji, 2016).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Ketua BPD, dan tokoh masyarakat menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kampung pada setiap tahapannya. Untuk itu, pemerintah Kampung mengundang perwakilan kelompok, lembaga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh pendidikan, dan pihak terkait lainnya untuk hadir pada setiap tahapan Musrenbang Kampung, kecuali pada tahapan pasca Musrenbang Kampung. Namun, banyak peserta yang diundang tidak hadir, sehingga kontribusi yang diterima pemerintah Kampung masih jauh dari harapan.

Adanya partisipasi masyarakat melalui pemberian usulan program juga sangat penting dalam setiap tahapan Musrenbang Kampung, karena tugas utama dari Musrenbang Kampung sendiri adalah agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi, setiap peserta Musrenbang Kampung memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan usulan program. Namun, banyak peserta yang hadir ternyata tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Dalam hal ini, kepala dusun menjadi pihak yang mengambil alih dan masyarakat juga sudah menyetujui hal tersebut. Namun, banyak masyarakat yang tidak aktif dalam memberikan usulan pada forum karena merasa bahwa usulan mereka tidak akan terwujud sesuai dengan harapan mereka. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa peran mereka dalam forum ini hanya sebagai formalitas saja dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan (Bao et al., 2015).

Hasil wawancara dengan Kepala Distrik menjelaskan, bila masyarakat kampung tidak ada pengusulan maka, dari aparat distrik yang akan membuat sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman mereka dan pada umumnya usulan ini sebenarnya juga akan mencukupi bila aparat distrik yang membantu untuk membuat tersebut cukup mengenal dengan situasi dan kondisi dari kampung tersebut. Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam bentuk memberikan usulan program, tetapi juga melalui evaluasi dan masukan terhadap program prioritas yang akan diterapkan oleh pemerintah Kampung. Usulan program bisa datang dari baik masyarakat maupun pemerintah, namun penting untuk memastikan bahwa semua usulan memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat Kampung (Sulaeman, Mustanir, & Muchtar, 2019).

Meskipun pemerintah Kampung memiliki beberapa program tetap, mereka masih harus mempertimbangkan pendapat dan pemahaman masyarakat (Anugrah et al., 2021). Oleh karena itu, pemerintah Kampung selalu memastikan bahwa

masyarakat mengetahui program-program yang ditawarkan serta manfaat yang akan didapatkan dari program tersebut. Namun, masyarakat di Kampung Wapeko kurang mengetahui informasi tentang program dan anggaran yang tersedia, sehingga mereka sering menerima keputusan akhir yang diambil oleh pemerintah Kampung tanpa persiapan yang matang.

Menurut hasil wawancara, partisipasi masyarakat dalam setiap tahap Musrenbang Kampung masih rendah karena masih ada sejumlah masyarakat yang tidak hadir pada acara tersebut dengan beberapa alasan dan pemerintah Kampung Wapeko juga belum memastikan untuk memasukkan peran masyarakat dalam setiap tahapan Musrenbang Kampung, alasan utama adalah ada pandangan bahwa semua usulan yang di buat belum tentu akan diakomodir dan tersedia dananya. Hasil wawancara dari Kepala distrik menjelaskan bahwa benar tidak semua usulan akan dibiayai oleh APBD, tetapi bila usulan tersebut dianggap baik maka usulan tersebut dapat dilaksanakan dengan Alokasi Dana Desa.

Hal ini menjadi permasalahan besar karena mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kampung. Minimnya informasi yang disampaikan oleh pemerintah Kampung menyebabkan masyarakat enggan untuk memberikan usulan dan berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan Musrenbang. Oleh karena itu, pemerintah Kampung harus memperbaiki sistem informasi dan komunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam memberikan usulan program yang bermanfaat bagi pembangunan Kampung. Alokasi anggaran yang tepat dan sesuai dengan usulan masyarakat juga merupakan hal yang penting agar masyarakat merasa terlibat dan memiliki peran aktif dalam pembangunan Kampung (Ibrahim Monalisa, Mustanir & Adnan, A Astinah, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kampung Wapeko masih berada pada tingkat tokenisme, yaitu tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti minimnya pengetahuan masyarakat tentang rencana pembangunan, informasi yang tidak akurat dan tidak jelas, serta enggannya masyarakat untuk memberikan usulan program. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kampung untuk memperbaharui dan memperkuat sistem informasi dan edukasi masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan berpartisipasi dengan lebih aktif dalam setiap tahapan Musrenbang Kampung

Tingkatan partisipasi harus ditingkatkan sehingga masyarakat dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan Kampung. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai tahapan-tahapan Musrenbang Kampung dan program pembangunan yang akan diterapkan. Pemerintah Kampung juga harus memberikan kesempatan dan dukungan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan usulan dan saran. Dengan

demikian, masyarakat dapat memahami dan merasa memiliki kontribusi dalam pembangunan Kampung (Oktavia 2015) .

Pada tahap pasca Musrenbang Kampung rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kampung dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, tingkat kesadaran politik, serta kebiasaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan (Mustanir & Jabbar, 2019). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kampung untuk terus berupaya meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat melalui berbagai cara seperti melakukan edukasi, memberikan informasi dan motivasi yang memadai, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang Kampung.

Partisipasi masyarakat yang rendah dalam Musrenbang Kampung dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik itu faktor yang mendorong maupun menghambat kegiatan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa ada faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kampung di Kampung Wapeko (Cahya & Wibawa, 2019).

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari partisipasi masyarakat Musrenbang Kampung dalam individu maupun kelompok masyarakat dan terkait dengan tingkah laku mereka. Salah satu contohnya adalah kesadaran masyarakat yang dapat ditingkatkan melalui motivasi untuk menumbuhkan rasa peduli, memiliki, dan bertanggung jawab pada tempat tinggal atau Kampung mereka.

Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya posisi dan peran mereka bisa memotivasi pihak kelurahan untuk menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hasil dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Kampung Wapeko masih sangat rendah, ditunjukkan oleh kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan seperti tidak banyak masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan rapat-rapat Kampung seperti Musrenbang Kampung, yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya (Saputra, 2017).

Aktifnya partisipasi seseorang dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kampung dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka. Dalam bermusyawarah, kemampuan untuk membuat argumen dan berpendapat sangat diperlukan agar atmosfer dalam forum menjadi aktif. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, masyarakat memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk menyampaikan gagasan mereka, memahami berbagai isu yang dihadapi kampung, dan memiliki daya saing yang lebih baik dalam bermusyawarah. Oleh karena itu, tingkat pendidikan sangat berpengaruh pada partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan kampung (Yunas, 2017).

Namun rata-rata peserta yang hadir dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kampung di Kampung Wapeko hanya memiliki pendidikan akhir sampai sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Ini mengakibatkan kurangnya keaktifan masyarakat dalam berpendapat dan memberikan usulan, saran, dan kritik terhadap program-program yang akan prioritas dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, kurangnya pendidikan yang memadai juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi aktif masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kampung.

Hasil dari penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Wapeko memiliki jenis pekerjaan dan penghasilan yang beragam, serta jadwal waktu yang berbeda, dengan mayoritas bekerja sebagai petani. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat di kampung tersebut tidak memiliki penghasilan yang tetap setiap bulan.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah merujuk pada *stakeholder* yang memiliki kepentingan terhadap program yang disusun. Faktor eksternal ini meliputi pemerintah Kampung dan fasilitas sarana dan prasarana. Peran pemerintah Kampung sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung. Oleh karena itu, diperlukan hubungan yang baik antara perangkat Kampung dan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi.

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kampung Wapeko tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai kegiatan pemerintah khususnya Musrenbang Kampung kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya partisipasi dalam Musrenbang Kampung. Selain itu, pelaksanaan Musrenbang Kampung juga terhambat karena kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah Kampung dan masyarakat untuk mempersiapkan proses pelaksanaan Musrenbang Kampung dengan lebih baik, termasuk menyediakan tempat yang cukup untuk menampung jumlah peserta yang memadai. Selain itu, terdapat kendala dalam mengundang peserta Musrenbang Kampung karena banyak masyarakat memiliki jenis pekerjaan dan jadwal yang berbeda-beda, serta penghasilan yang tidak tetap setiap bulan.

3. Usulan

Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kampung Wapeko Distrik Animha dalam musyawarah rencana pembangunan daerah (Azhar, 2015):

1. Penyebaran informasi yang efektif: pastikan bahwa informasi tentang musyawarah rencana pembangunan daerah dapat mencapai seluruh masyarakat, termasuk daerah-daerah terpencil.

2. Peningkatan akses: usahakan untuk menyediakan akses transportasi dan fasilitas yang memadai untuk mempermudah masyarakat untuk hadir dalam musyawarah.
3. Pendidikan dan sensitisasi: upayakan untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan memberikan sensitisasi tentang pentingnya partisipasi dalam musyawarah rencana pembangunan daerah.
4. Penyediaan sarana dan prasarana: pastikan bahwa fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk musyawarah rencana pembangunan daerah tersedia dan memadai.
5. Pengakuan dan penghargaan: berikan pengakuan dan penghargaan kepada masyarakat yang hadir dan berpartisipasi dalam musyawarah rencana pembangunan daerah untuk meningkatkan minat dan semangat mereka dalam berpartisipasi.
6. Penyertaan aktif: pastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk berbicara dan memberikan masukan mereka selama musyawarah rencana pembangunan daerah.

Dengan melakukan hal-hal ini, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di provinsi Papua dalam musyawarah rencana pembangunan daerah.

Kesimpulan

Dari permasalahan partisipasi masyarakat di Kampung Animha dalam musyawarah rencana pembangunan daerah, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya informasi, dan kurangnya kepedulian. Upaya-upaya yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti penyebaran informasi yang efektif, peningkatan akses, pendidikan dan sensitisasi, penyediaan sarana dan prasarana, pengakuan dan penghargaan, dan penyertaan aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan daerah merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Referensi

- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik: (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>
- Aisyah, O. P. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. *Jurnal Perspektif*, 8(April), 411–425.

- Ajat Rukajat. 2018. Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach. Yogyakarta: Deepublish.
- Al – Muchtar, Suwarman. 2015. Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
- Alastyaningsih, E., & Nenobais, D. H. (2022). Implementasi Program Kegiatan Infrastruktur Hasil Musrenbang Di Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen. *PUBLIKA Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 16–20.
- Anugrah, F. F., Salahudin, S., & Nurjaman, A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Lokal: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 6(4), 775. <https://doi.org/10.28926/briliant.v6i4.689>
- Azhar, F. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 63–70.
- Bao, Y., Wu, X., Xia, X., & Gao, Y. (2015). High-efficiency negative charge-pump circuit for WLED backlights. *Informacije MIDEM*, 45(4), 277–283.
- Cahya, K., & Wibawa, S. (2019). 5068-15355-1-Sm (1). 2(1), 79–92.
- Hadi, Hakim, A., & Noor, I. (2014). Wacana. *WACANA, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 17(1), 7–15. <http://www.wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/290>
- Hasan, M., Madani, M., & Fatmawati, F. (2020). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bulu-Bulu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. *JPPM: Journal of Public Policy and ...*, 2, 38–45.
- Hermawan, D., Saifuddin, R., & Prasetyo, S. (2018). Kinerja Musrenbang Provinsi Lampung 2017. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 6(01), 61–74. <https://doi.org/10.35450/jip.v6i01.57>
- Hirawan, Z. (2014). Efektivitas Musrenbang dalam Penyusunan APBD Kabupaten Subang. *Jurnal Administrasi Publik UNTIRTA*, 5(2), 216–231.
- Irawan, A., & Sunandar, E. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(03), 196–212. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i03.2170>
- Kurniawati, I. P., & Eprilianto, D. F. (2022). Analisa Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Desa Gayam Kabupaten KEDI. *Publika*, 10(2), 441–456.
- Kusnadi, I. H. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Subang. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 5, 5718–5729. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/2338>
- Makhmudi, D. P., & Muktiali, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Pada Program Plpbk Di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(2), 108. <https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.108-117>

- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Oktavia, S., & . S. (2015). Hubungan Peran Stakeholders Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(3), 231–246. <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.9407>
- Pratama, M. R., Fatmawati, F., & Azikin, R. (2018). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.26618/kjap.v4i1.1427>
- Purwaningsih, M. R. (2022). Pelaksanaan Musrenbang Daerah Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran Partisipatif. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 6(1), 151–164. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.346>
- Putri, L. S. (2016). Village Authority and the Issuance of Village Regulation. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(02), 161–176.
- Razak, T. S., Azuz, F., & Ibrahim, S. (2020). Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbang: Perspektif Komunikasi Pemerintahan. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 2(2), 149–162.
- Reskiaddin, L. O., Anhar, V. Y., Sholikah, & Wartono. (2020). Challenges and Barrier on Community Empowerment in Communicable Disease on Semi Rural Area : A Evidence Based Practice in Padukuhan Samirone, Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesmas Jambi (JKMJ)*, 4(2), 43–49.
- Saputra, W. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) Di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan *Tanjung Pinang*.
- Sigalingging, A. H., & Warjio. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(1), 85–107.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*, Alfabeta Bndung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25. (2004). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1(3), 1–32.
- Yonis, R. (2016). Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian (Studi Kasus Kabupaten Padang Pariaman). *J. Pembangunan Nagari*, 1(2), 71–88.

Yunas, N. S. (2017). Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7 (1), 19. <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.387>